

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Otonomi daerah merupakan kebijakan yang memberikan kewenangan yang lebih luas terhadap masing-masing pemerintah daerah untuk mengatur pengelolaan daerahnya (Adi, 2012). Pelaksanaan kebijakan otonomi daerah dapat memberikan peluang yang besar bagi masyarakat dalam upaya pembangunan dan pengembangan potensi yang dimiliki di daerah kabupaten dan kota (Sulistyaningrum, 2008). Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah menggariskan bahwa maksud dan tujuan pemberian otonomi daerah adalah memacu kesejahteraan, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta meningkatkan kesejahteraan rakyat, menggalakkan prakarsa dan peran serta aktif masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah secara luas, nyata dan bertanggungjawab serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, peningkatan pelayanan publik dan daya saing daerah. Dengan adanya kebijakan pemerintah dalam membentuk daerah otonomi di daerah muncul berbagai dampak antara lain, terjadinya pemekaran daerah yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Mastur, 2008).

Pemekaran daerah mengakibatkan munculnya daerah otonom baru yang memiliki tujuan untuk memaksimalkan pelayanan terhadap masyarakat di daerah sehingga dapat mengurangi tingkat kemiskinan dan memaksimalkan

potensi yang dimiliki masing-masing daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (PP No. 78 Tahun 2007).

Pemekaran daerah timbul karena dilatarbelakangi oleh luasnya kondisi wilayah dalam suatu daerah, pemerataan ekonomi dan peningkatan kualitas layanan publik. Kebijakan pemekaran daerah yang ditetapkan pemerintah memiliki tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan seluruh aspek yang terdapat dalam pemerintah daerah. Manfaat yang diperoleh dalam pemekaran daerah antara lain, meratakan pertumbuhan ekonomi daerah hasil pemekaran, memaksimalkan potensi yang dimiliki setiap daerah sehingga terjadi pemerataan dalam pendapatan antara daerah induk dengan daerah hasil pemekaran (Agustino dan Yusoff, 2008). Pemekaran daerah dapat meningkatkan tingkat efisiensi pembangunan dalam suatu wilayah. hal ini terjadi karena masyarakat akan memperoleh kewenangan yang luas dalam mengelola potensi yang dimiliki di daerahnya, sehingga memberi dampak positif terhadap perekonomian daerahnya. Untuk menganalisis apakah tujuan yang diharapkan dapat tercapai, perlu dilakukan analisis terhadap kinerja keuangan di daerah induk dan daerah hasil pemekaran baru.

Kinerja keuangan merupakan indikator keuangan yang digunakan untuk menilai kinerja keuangan masa lalu untuk melihat hasil pencapaian sesuai yang direncanakan dan mengevaluasi tren dalam akuntansi untuk entitas yang sama dalam suatu periode. Analisis terhadap kinerja keuangan dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai macam rasio, antara lain rasio pertumbuhan, rasio kemandirian, rasio efisiensi, rasio efektivitas, rasio perputaran aset,

ROA, rasio pengelolaan belanja dan *current ratio* (Sularso dan Restianto, 2011; Halim, 2008; Cohen, 2008). Kinerja keuangan merupakan tingkat pencapaian suatu target kegiatan keuangan pemerintah daerah yang diukur melalui indikator-indikator keuangan yang dapat dinilai dari hasil pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Analisis terhadap kinerja keuangan dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai macam rasio, antara lain rasio pertumbuhan (*growth ratio*), rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas PAD, rasio aktivitas (Mentari Yosephen, 2013).

Analisis terhadap dampak pemekaran antara daerah induk dengan daerah otonom baru memberikan hasil yang berbeda tergantung dari kinerja masing-masing daerah dalam menyeimbangkan segala aspek agar daerah otonom baru memiliki kemampuan yang sama dengan daerah induk, sehingga kesejahteraan masyarakatpun terjamin (BAPPENAS, 2008).

Evaluasi terhadap daerah pemekaran menunjukkan hasil yang tidak sesuai harapan. Banyaknya kendala yang tidak dapat terselesaikan mengakibatkan timbulnya ketimpangan ekonomi antara daerah induk dengan daerah hasil pemekaran. Masalah lain yang muncul antara lain rendahnya kinerja keuangan di daerah hasil pemekaran dibandingkan dengan kinerja daerah di daerah induk (Mastur, 2008; Riani dan Kaluge, 2011; BAPPENAS, 2008).

Penelitian yang dilakukan oleh PKP2AI (2004) di Kabupaten Tasikmalaya menunjukkan bahwa sebelum pemekaran wilayah terjadi

kesenjangan antarawilayah yang ada di perkotaan dengan wilayah yang ada di perdesaan. Setelah pemekaran dilakukan, pemerataan pendapatan di Kabupaten Tasikmalaya semakin meningkat. (Riani dan Pudjihardjo, 2012; Ga'i, Hidayat, Santoso, 2010)

Menurut Depdagri (2013), proses pemekaran daerah telah berjalan selama kurun waktu 15 tahun, tetapi berbagai permasalahan dan kendala kinerja belum dapat diselesaikan. Hal ini dapat dilihat dari rendahnya ketersediaan infrastruktur di daerah hasil pemekaran, masih tingginya tingkat ketergantungan terhadap transfer dana bantuan dari daerah induk, pembagian potensi yang tidak merata dan kesejahteraan masyarakat di daerah hasil pemekaran masih tertinggal dengan kesejahteraan masyarakat di daerah induk. Dari permasalahan tersebut memotivasi penulis untuk mengevaluasi kinerja keuangan daerah pada daerah induk dan daerah hasil pemekaran dengan judul **“PERBEDAAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH ANTARA DAERAH INDUK DAN DAERAH OTONOM BARU SETELAH PEMEKARAN”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Pemekaran daerah menghasilkan daerah otonom baru yang berupaya untuk meningkatkan pelayanan publik dan mempercepat pelaksanaan pembangunan perekonomian di daerah (Agustino dan Yusoff, 2008). Menurut PP No. 129 tujuan pemekaran daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan meningkatkan serta mempercepat

pelayanan, kehidupan demokrasi, perekonomian daerah, pengelolaan potensi daerah, keamanan dan ketertiban dan peningkatan hubungan yang serasi antara daerah dan pusat.

Menurut Riani dan Pudjiharjo (2012), hasil evaluasi mengenai dampak pemekaran daerah di Indonesia memiliki hasil yang berbeda. Untuk mengevaluasi perbedaan kinerja keuangan antara daerah induk dan daerah otonom baru.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perumusan masalah yang akan dianalisis adalah apakah terdapat perbedaan rasio efisiensi, rasio kemandirian, rasio pengelolaan belanja, rasio derajat desentralisasi, rasio belanja operasi antara pemerintah daerah induk dan daerah otonom baru setelah pemekaran?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini untuk:

1. Menganalisis perbedaan rasio efisiensi antara pemerintah daerah induk dan daerah otonom baru setelah pemekaran.
2. Menganalisis perbedaan rasio kemandirian antara pemerintah daerah induk dan daerah otonom baru setelah pemekaran.
3. Menganalisis perbedaan rasio pengelolaan belanja antara pemerintah daerah induk dan daerah otonom setelah pemekaran.
4. Menganalisis perbedaan rasio derajat desentralisasi antara pemerintah daerah induk dan daerah otonom baru setelah pemekaran.

5. Menganalisis perbedaan rasio belanja operasi antara pemerintah daerah induk dan daerah otonom baru setelah pemekaran.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini juga bermaksud untuk memberikan manfaat bagi pihak yang memerlukan, pihak pemerintah dan publik sebagai pembacanya, adapun manfaatnya sebagai berikut:

1. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan agar dapat menambah pengetahuan peneliti dan sarana dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh di bangku kuliah Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta.

2. Bagi pemerintah

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan mengenai pemekaran daerah.

3. Bagi pembaca

- a. Sebagai bahan referensi yang dapat membantu untuk penelitian selanjutnya.
- b. Sebagai tambahan yang digunakan untuk memperluas ilmu pengetahuan dan wawasan yang berhubungan dengan evaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah antara daerah induk dengan daerah otonom baru.

## **E. SISTEMATIKA PENULISAN**

Dalam laporan penelitian ini, sistematika pembahasan terdiri atas lima bab, masing-masing uraian yang secara garis besar dapat diterangkan sebagai berikut:

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini berisi tentang landasan teori yang diperoleh dari uraian buku-buku serta jurnal-jurnal yang terkait dengan topik penelitian, penelitian terdahulu, pengembangan hipotesis serta kerangka pemikiran.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada bab ini berisi tentang metode penelitian yang memuat tentang variabel penelitian, definisi operasional, penentuan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, definisi dan pengukuran variabel dan metode analisis data.

### **BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi penyajian dan analisis data. Menyajikan penelitian dan menyelesaikan hasil pengumpulan serta analisis data, sekaligus

merupakan jawaban atas hipotesis yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya yaitu daerah-daerah yang dimekarkan di Indonesia mulai Tahun 2007-2009 kemudian dilanjutkan dengan analisis data dan pembahasan.

## **BAB V : PENUTUP**

Pada bab ini menguraikan kesimpulan yang ditarik berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data, keterbatasan-keterbatasan dalam penelitian ini dan saran saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan, serta keterbatas penulis dalam penyusunan skripsi.